

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) mencerminkan integrasi keenam indikator yang dikemukakan oleh Bayne dan Woolcock. Pertama, kekuatan ekonomi Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar dunia menjadi fondasi diplomasi, meskipun tantangan deforestasi dan regulasi EUDR mengancam daya saing. *Agritech*, melalui teknologi seperti *blockchain* dan *AI-Remote Sensing*, berperan meningkatkan efisiensi produksi dan keberlanjutan, sekaligus memperkuat posisi tawar di pasar global. Kedua, Indonesia memanfaatkan rezim dan organisasi internasional melalui forum seperti *Joint Task Force* dengan Uni Eropa dan Malaysia, serta upaya litigasi di WTO, menunjukkan strategi adaptif dalam merespons tekanan regulasi. Ketiga, dinamika pasar internasional, khususnya tuntutan Uni Eropa sebagai mitra strategis, mendorong adopsi teknologi ketertelusuran dan sertifikasi ISPO/Rspo untuk memenuhi standar EUDR, sekaligus membuka peluang diversifikasi pasar ke kawasan seperti Afrika dan Amerika Latin.

Keempat, kolaborasi antar-pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan petani kecil, melalui kelompok tani dan pendampingan teknologi, memperkuat kohesi dalam memenuhi standar keberlanjutan. Hal ini mengurangi risiko eksklusi petani kecil dari rantai pasok global. Kelima, penguatan institusi domestik melalui ISPO, koordinasi antar-kementerian, serta inisiatif BRIN dan BRIDA dalam membangun ekosistem riset *agritech*, menjadi langkah krusial. Namun, tantangan seperti data *smallholders* yang belum terintegrasi dan birokrasi yang lambat masih menghambat efektivitas kebijakan. Terakhir, upaya persuasi melalui diplomasi publik, kampanye keberlanjutan, dan transparansi data *agritech* berhasil membangun narasi positif tentang komitmen lingkungan Indonesia, sekaligus memperkuat legitimasi di mata investor dan mitra dagang.

Diplomasi ekonomi Indonesia menghadapi EUDR mencerminkan integrasi keenam indikator Bayne dan Woolcock. *Agritech* tidak hanya menjadi solusi teknis, tetapi juga instrumen strategis yang memperkuat kekuatan ekonomi, memanfaatkan rezim internasional, menjaga akses pasar, menyelaraskan kepentingan *stakeholder*, memperkuat institusi domestik, dan membangun persuasi melalui inovasi. Tantangan ke depan terletak

pada konsistensi koordinasi kebijakan, peningkatan kapasitas petani kecil, dan pengakuan global terhadap ISPO.

4.2 Saran

1. Pemerintah perlu membentuk lembaga koordinasi khusus yang melibatkan kementerian terkait, sektor swasta, dan asosiasi petani untuk menyelaraskan kebijakan domestik dengan tuntutan EUDR. Koordinasi ini harus fokus pada penyediaan data *smallholders* yang terintegrasi, harmonisasi regulasi, serta percepatan implementasi ISPO. Forum reguler dengan agenda yang jelas akan meningkatkan efektivitas diplomasi ekonomi.
2. Melalui *Joint Task Force* dan negosiasi IEU-CEPA, pemerintah harus memperjuangkan pengakuan ISPO sebagai standar setara dengan sertifikasi Uni Eropa. Diplomasi proaktif dengan menyertakan bukti empiris dapat meyakinkan Uni Eropa bahwa ISPO memenuhi kriteria EUDR. Kolaborasi dengan lembaga riset Eropa untuk validasi ilmiah ISPO juga perlu dioptimalkan.
3. Mengatasi tantangan data *smallholders* dengan membangun platform digital terpusat yang memetakan lokasi, kepemilikan lahan, dan praktik keberlanjutan petani. Teknologi *blockchain* dan GIS dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi rantai pasok. Pemerintah dan swasta harus berkolaborasi dalam pendanaan, pelatihan penggunaan alat digital, serta penyediaan akses internet di daerah terpencil.
4. Mengintegrasikan *agritech* dalam kebijakan nasional melalui insentif fiskal bagi perusahaan yang mengadopsi teknologi tersebut. BRIN dan BRIDA perlu memperkuat riset terapan berbasis kebutuhan petani, sementara Kementan dapat membentuk pusat inovasi *agritech* yang menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan teknis gratis bagi petani kecil.
5. Memperluas kerja sama dengan negara produsen kelapa sawit untuk membentuk koalisi strategis di forum internasional. Koalisi ini bertujuan menekan Uni Eropa agar kebijakan EUDR tidak bersifat diskriminatif sekaligus membuka pasar alternatif di Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin melalui promosi keunggulan komparatif sawit Indonesia.
6. Melakukan kampanye global untuk mengubah narasi negatif sawit dengan menyoroti efisiensi lahan dan kontribusi terhadap SDGs. Diplomasi publik melalui media internasional, webinar dengan pakar lingkungan, dan partisipasi dalam pameran perdagangan hijau dapat meningkatkan citra positif. Selain itu, membentuk tim

advokasi khusus di Kedutaan Besar RI di Uni Eropa untuk memantau perkembangan kebijakan dan memberikan respons cepat.

